

# EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN DI KECAMATAN MAESA KOTA BITUNG

*Gerry Pardamean Mandak<sup>1</sup>*

## **Abstrak**

Setelah sekian tahun program pengembangan dilaksanakan dengan tujuan dapat memberikan peningkatan kemampuan kecamatan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui evaluasi kebijakan program pengembangan kecamatan Maesa Kota Bitung, dengan metode penelitian kualitatif, informan yang ditentukan adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Sejahtera Kota Bitung, yakni pejabat-pejabat yang telah atau yang sedang mengurus PPK, diantaranya para Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi dan Pelaksana, Camat, Fasilitator Kecamatan Maesa, Ketua dan anggota Unit Pelaksana Kegiatan, Tokoh Masyarakat, dan Penerima Manfaat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi pelaksanaan program SPP ini di katakan belum berhasil dengan baik. Ada beberapa masalah yang terjadi dalam pelaksanaannya seperti dana yang menunggak di akibatkan oleh beberapa anggota yang tidak menyetor setiap bulan dan adanya pengurus yang menyalahgunakan dana yang sudah di setor. Hal ini membuat pada perguliran berikutnya menjadi terhambat dan membuat tim pengelola menjadi kesulitan dalam mengelola dana tersebut. Hal ini juga di sebabkan oleh kurangnya pemantauan dari tim pemantau kegiatan dan juga Tim Pelaksana kegiatan.

**Kata Kunci: Evaluasi, Kebijakan, Program Pengembangan Kecamatan.**

<sup>1</sup>*Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat.*

## Pendahuluan

Pembangunan nasional merupakan rangkaian proses perubahan struktural yang dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan (*sustainable*). Dalam perjalanan waktu, berbagai kebijakan dilaksanakan sejalan dengan sasaran dan tujuan pembangunan nasional sesuai amanat Pancasila, UUD 1945 dan kebijakan pembangunan nasional. Selanjutnya, bahwa inti yang terkandung dalam ketiga kebijakan tersebut di atas yaitu kebijakan yang diharapkan adalah kebijakan pembangunan yang lestari, kebijakan yang berpijak pada peningkatan peran serta masyarakat (partisipasi), produktifitas rakyat dan efisiensi dengan mengikutsertakan masyarakat sebagai obyek sekaligus subyek pembangunan. Sementara proses Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di kecamatan Maesa Kota Bitung yang berupa: kegiatan sosial dan pembangunan sarana/prasarana, diantara prasarana yang telah dibangun adalah jenis prasarana dasar lingkungan berupa prasarana jalan (lorong atau penghubung jalan), trotoar yang selalu digunakan penduduk, prasarana saluran untuk mencegah banjir dan kenyamanan lingkungan perkotaan belum sepenuhnya terlaksana sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor II Tahun 2013 yang mengatur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bitung Tahun 2013-2033, Pasal 1 ayat 7 Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat pemukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Pasal 27, Rencana infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf d meliputi prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki. Pasal 31,

perbaikan dimensi penampang bangunan-bangunan pelengkap seperti jembatan dan gorong-gorong disetiap kelurahan. Pasal 33, Rencana pengembangan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf f meliputi:

- a. Penyediaan ruang pejalan kaki disisi jalan berupa trotoar disepanjang jalan Walanda Maramis, jalan terminal tangkoko, jalan S.H. Sarundajang.
- b. Ruang pejalan kaki dikawasan yang memiliki mobilitas tinggi pada hari-hari tertentu, seperti gelaggang olahraga, tempat-tempat ibadah diseluruh kota.
- c. Penyediaan jalur pejalan kaki yang aman dan nyaman dapat diakses oleh penyandang cacat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Penyediaan jalur pejalan kaki yang menghubungkan antar perumahan dijalan lingkungan maupun jalan kolektor sekunder diseluruh wilayah kota.
- e. Penyediaan elemen perabotan jalan pada jalur pejalan kaki diseluruh wilayah kota.
- f. Dalam pengelolaan Program Pengembangan Kecamatan, masyarakat mendapatkan kewenangan untuk mengelola semua kegiatan secara mandiri dan partisipatif dengan ikut terlibat dalam setiap tahapan kegiatan mulai dari sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelestarian dan pengembangan kegiatan. Selain itu masyarakat mendapat pendamping dari fasilitator, dukungan dari pemerintah dan juga adanya Kelembagaan Program Pengembangan Kecamatan berupa organisasi pengelolaan di tingkat Desa dan Kecamatan yang anggotanya berasal dari masyarakat

serta mendapat pelatihan-pelatihan yang mendukung peningkatan kemampuan masyarakat sebagai pelaku utama Program Pengembangan Kecamatan dan penerima manfaat dari hasil pembangunan. Keberhasilan program pembangunan dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat, mekanisme pelaksanaan program serta proses pendampingan dalam menerapkan pendekatan partisipasi dan partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh tingkat kewenangan atau kekuasaan masyarakat untuk mengontrol atau menentukan pengambilan keputusan dalam berbagai tahapan kegiatan tersebut untuk menyakinkan bahwa kepentingannya dapat dipenuhi.

g. Sejak diimplementasikan Program Pengembangan Kecamatan tersebut di Kecamatan Kecamatan Maesa Kota Bitung, saat ini faktanya menunjukkan keberhasilan yang bervariasi. Berkaitan dengan hal tersebut, evaluasi kebijakan yang telah dilakukan menjadi salah satu simpul penting didalam menentukan efektifitas dan keberlanjutan program yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga publik (dalam hal ini UPK Kecamatan Maesa Kota Bitung). Meningkatnya permintaan publik terhadap akuntabilitas kinerja lembaga sebagai hasil dari perubahan lingkungan perekonomian, pertumbuhan media, serta semakin banyaknya komitmen dari para pelaksana kegiatan dan program yang berkaitan dengan kepentingan publik untuk mengoptimalkan sumber daya pembangunan, tentunya merupakan justifikasi utama pentingnya pelaksanaan pengukuran kinerja di lembaga publik.

h. Dari hal tersebut maka akan dilakukan kajian terhadap Evaluasi Kebijakan Program Pengembangan

Kecamatan (PPK) di Kecamatan Maesa , Kota Bitung. Sebagai sebuah kebijakan tentunya Program Pengembangan Kecamatan (PPK) mempunyai ketentuan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaannya. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu dilakukan penelitian tentang Evaluasi Kebijakan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Maesa Kota Bitung.

Evaluasi merupakan salah satu tingkatan didalam proses kebijakan publik, evaluasi adalah suatu cara untuk menilai apakah suatu kebijakan atau program itu berjalan dengan baik atau tidak. Evaluasi menurut Dunn yang dikutip oleh Riant Nugroho dalam bukunya Kebijakan Publik (formulasi, implementasi, dan evaluasi) mendefinisikan evaluasi sebagai: "Evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penafsiran (appraisal), pemberian angka (rating) dan penilaian (assessment), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan lainnya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan" (Nugroho, 2003:181).

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Kebijakan Program Pengembangan Kecamatan di Kecamatan Maesa Kota Bitung? Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan Kebijakan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Maesa Kota

Bitung berupa kegiatan sosial dan pembangunan sarana/ prasarana, diantara prasarana yang telah dibangun adalah jenis prasarana dasar lingkungan berupa prasarana jalan (lorong atau penghubung jalan), dan program simpan pinjam perempuan (SPP).

### **Tinjauan Pustaka**

Evaluasi adalah kegiatan menilai mencari terobosan baru untuk mencapai penyempurnaan. Evaluasi sekaligus sebuah proses analisis yang menekankan pada penciptaan premis-premis nilai yang memberikan penilaian terhadap kinerja sebuah program, kebijakan dan atau sebuah kegiatan. Proses evaluasi sekaligus memberikan tanggapan terhadap sebuah pertanyaan “Apa perbedaan yang dibuat? Artinya evaluasi merupakan analisa terhadap sebuah fakta dan tanggapan yang dihasilkan ketika sebuah program atau kebijakan dilaksanakan. (Dunn : 2000 : 607). Kebijakan pembangunan nasional terangkai dalam tiga arah kebijakan yang saling mendukung. Pertama, kebijakan yang secara tidak langsung mengarah pada sasaran tetapi memberikan dasar tercapainya suasana yang mendukung kegiatan sosial ekonomi. Kedua, kebijakan yang secara langsung mengarah pada peningkatan kegiatan ekonomi kelompok. Ketiga, kebijakan khusus yang mencakup upaya-upaya khusus pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan yang langsung menjangkau masyarakat miskin. (Sumodiningrat: 2007).

Pendekatan pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu wujud pembangunan alternatif yang menghendaki agar masyarakat mampu mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. *Empowerment* (pemberdayaan) berasal dari bahasa Inggris, dimana *power* diartikan sebagai

kekuasaan dan kekuatan. Menurut Robert Dahl (1973 : 50), pemberdayaan diartikan pemberian kuasa untuk mempengaruhi atau mengontrol, manusia selaku individu dan kelompok yang berhak untuk ikut berpartisipasi terhadap keputusan-keputusan sosial yang menyangkut komonitasnya. Sedangkan menurut Korten (1992) pemberdayaan adalah peningkatan kemandirian rakyat berdasarkan kapasitas dan kekuatan internal rakyat atas sumber daya manusia baik material maupun non material melalui redistribusi modal.

Pembangunan partisipatif merupakan pendekatan pembangunan yang sesuai dengan hakikat otonomi daerah yang meletakkan landasan pembangunan yang tumbuh berkembang dari masyarakat, diselenggarakan secara sadar dan mandiri oleh masyarakat dan hasilnya dinikmati oleh seluruh masyarakat (Sumaryadi, 2005:87). Melalui program-program pembangunan partisipatif tersebut diharapkan semua elemen masyarakat dapat secara bersama-sama berpartisipasi dengan cara mencurahkan pemikiran dan sumber daya yang dimiliki guna memenuhi kebutuhannya sendiri. Menurut *Department of Health & Human Services*, evaluasi adalah proses untuk mengumpulkan informasi. Sebagaimana dengan proses pada umumnya, evaluasi harus dapat mendefinisikan komponen-komponen fase dan teknik yang akan dilakukan. Pengertian lain dikemukakan oleh Rossi (1993:5) menyebutkan bahwa evaluasi merupakan suatu aplikasi penilaian yang sistematis terhadap konsep, desain, implementasi, dan manfaat aktivitas dan program dari suatu instansi pemerintah. Dengan kata lain, evaluasi dilakukan untuk menilai dan meningkatkan cara-cara dan

kemampuan berinteraksi instansi pemerintah yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerjanya.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan sebuah upaya untuk mengkaji dan mengungkap tentang bagaimana kebijakan program pengembangan kecamatan di Kecamatan Maesa Kota Bitung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berpandangan bahwa realitas dilapangan sebagai sesuatu yang holistik, kompleks, dinamis, penuh makna dan pola pikir induktif. Oleh sebab itu, berdasarkan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, maka fokus penelitian ini adalah : “Evaluasi Kebijakan Program Pengembangan Kecamatan (Studi tentang Pelaksanaan Kebijakan Program Pengembangan Kecamatan di Kecamatan Maesa Kota Bitung berupa kegiatan sosial dan pembangunan sarana prasarana. Jumlah informan yang dibutuhkan memperhatikan apa yang ingin diketahui sesuai dengan data dan informasi yang dibutuhkan, sumber daya yang dimiliki informan dan peneliti serta terjadinya pengulangan informasi dari informan ke informan yang akan diwawancarai adalah representasi dari:

- 1) Kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Sejahtera Kota Bitung, yakni pejabat-pejabat yang telah atau yang sedang mengurus PPK, diantaranya para Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi dan Pelaksana.
- 2) Camat Kecamatan Maesa
- 3) Fasilitator Kecamatan Maesa,
- 4) Ketua dan anggota Unit Pelaksana Kegiatan,
- 5) Tokoh Masyarakat, dan

### 6) Penerima Manfaat

### **Pembahasan**

Berdasarkan teori yang di kemukakan oleh Patton dan Sawicki (1991) yang di kutip oleh Riant Nugroho (2003) dalam bukunya :*Kebijakan publik, formulasi, implementasi dan evaluasi* adalah:

1. Before and after comparisong (sebelum dan sesudah)

Dalam Program Pengembangan Kecamatan (PPK), seluruh anggota masyarakat di ajak terlibat dalam setiap tahapan kegiatan secara partisipatif, mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan dalam penggunaan dan pengolahan data sesuai kebutuhan paling prioritas di kecamatan, sampai pada pelaksanaan kegiatan dan pelestariannya. Pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan berada dibawah binaan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Departemen Dalam Negeri. Program ini di dukung dengan pembiayaan yang berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan hibah dari sejumlah lembaga pemberi bantuan di bawah koordinasi Bank Dunia.

Dengan adanya Program Pengembangan Kecamatan ini Masyarakat merasa terbantu dalam kehidupan sehari-harinya. Dengan meminjam dana kepada program SPP untuk membuat modal utama. Di awal pelaksanaan program ini berjalan dengan baik, namun pada perguliran kegiatan program ini tidak berjalan sesuai dengan prosedur. Adanya dana-dana yang tidak kembali sesuai dengan pinjaman yang di pinjam dan ada pula yang mengembalikan namun, di

salah gunakan oleh tim yang mengurus dana tersebut. Hal ini membuat dana yang di gulirkan pada tahap berikutnya tidak sesuai dengan yang di inginkan oleh anggota-anggota lainnya.

2. With and without comparison (yang menerima program dan yang tidak menerima program)

PPK memberikan kesempatan kepada kaum perempuan untuk meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui pendanaan modal usaha, sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional PPK, bahwa dalam setiap tahapan alur kegiatan program, keterlibatan perempuan sangat di perhatikan. Hal ini sangat terlihat dari salah satu tahapan yaitu Musyawarah Kelurahan Perempuan dimana salah satu hasil yang di harapkan dari usulan kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Pentingnya kehadiran perempuan dalam tahapan alur kegiatan ini merupakan salah satu bentuk untuk memberikan kesempatan perempuan terlibat dalam program pemberdayaan. Seluruh anggota kelompok di berikan kesempatan seluas-luasnya mendapatkan dana/modal bagi usahanya dan anggota mendapatkan kemudahan untuk mengakses modal tersebut.

Dalam pelaksanaannya program SPP ini ada masyarakat yang menerima dan ada yang tidak menerima program SPP ini. Masyarakat yang menerima program ini adalah masyarakat adalah masyarakat yang merasa terbantu dalam setiap pergulirannya. Sedangkan yang tidak menerima adalah masyarakat yang di buat resah karena program tersebut tidak bisa membantu mereka dan hanya orang-orang tertentu saja. Di Kecamatan Maesa program SPP ini

dalam pelaksanaannya kurang efektif karena tim pengelolah tidak bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang telah di percayakan oleh masyarakat.

3. Actual versus planed performance comparisong (membandingkan kondisi yang ada dengan ketetapan dalam perencanaan)

Pada pembahasan ini, peneliti akan membandingkan program SPP yang ada di Kecamatan Maesa dengan ketetapan perencanaan. Program SPP yang ada di Kecamatan Maesa tidak sesuai dengan ketetapan dalam perencanaan karena adanya masalah yang di dapat dalam pelaksanaannya. Pada perencanaan sudah di atur dengan baik supaya tidak membuat program SPP tersebut gagal, namun pada kenyataannya dalam pelaksanaannya program tersebut mengalami kegagalan dalam setiap pergulirannya yang di akibatkan pada tahap perguliran berikutnya dana yang sudah di cairkan tidak bisa di kembalikan sepenuhnya.

Menurut ketua dari program PPK tersebut, Bapak P. H. Sasombo mengatakan: *“program SPP yang di laksanakan di kelurahan pakadoodan kami ini sebelumnya berjalan dengan baik, namun lama kelamaan terjadi beberapa masalah dalam pelaksanaannya. Masalah yang terjadi adalah tunggakan dana dari masing-masing kelompok. Masalah tersebut perlu di perhatikan karena sudah banyak dana menunggak, dari masing-masing kelompok seringkali hanya satu dua orang yang menyetor setiap bulannya. Sudah sering kali di adakan pertemuan/musyawarah di desa dalam rangka membahas masalah tersebut, namun sering kali anggota dari masyarakat tersebut tidak menghadiri pertemuan tersebut hanya sebagian*

*dari anggota saja. Ini membuat TPK mengalami kesulitan dalam menggulirkan dana berikutnya di karenakan dana yang sudah di cairkan sebelumnya belum sepenuhnya di kembalikan. Dalam pelaksanaan program ini yang menjadi faktor penghambat adalah anggota yang tidak menyetor dan hanya setengahnya saja yang di kembalikan dan terdapat juga faktor pendukung seperti adanya anggota yang rajin untuk mengembalikan uang tersebut dan tidak pernah terlambat menyetor”.*

Pada penelitian ini, peneliti membuat identifikasi masalah berdasarkan observasi awal di lapangan , yaitu program SPP awal dalam pergulirannya sering mengalami kendala seperti menunggaknya penyeteroran dana pada setiap bulannya sehingga menjadi salah satu penghambat dalam perguliran berikutnya.

Berdasarkan hasil penelitian, yang di lakukan di Kecamatan Maesa mengenai Evaluasi Program Pengembangan Kecamatan dalam Program SPP. Dari hasil wawancara bersama dengan beberapa informan mengenai dana bergulir ini pada pelaksanaannya mengalami beberapa hambatan. Program SPP di beberapa kelurahan yang ada di kecamatan maesa saya temukan 2 kelompok yaitu kelompok Sekar Harum dan kelompok PKK. Pada kelompok Sekar Harum terdiri dari 9 anggota sudah termasuk dengan pengurus. Masing-masing anggota meminjam dana yang cukup besar. Pada kelompok ini sering mengalami kendala di karenakan adanya tunggakan dana dari beberapa anggota. Jumlah dana yang di pinjam pada kelompok ini sebesar Rp. 78.000.000 namun dana yang di kembalikan hanya Rp. 61.146.000 dan tunggakan dana adalah sebesar Rp.

26.994.000 dapat di katakan hanya satu dua orang yang tidak dapat menyetor dana tersebut.

Pernyataan yang di sampaikan oleh ibu pomantung yang merupakan pengurus dari kelompok tersebut mengatakan: *“saya sebagai pengurus sudah sering mengingatkan anggota supaya tetap menyetor tiap bulannya, namun masih ada satu dua orang yang tidak menyetor setiap bulannya.*

Di bandingkan dengan kelompok Sekar Harum , pada kelompok PKK juga mengalami hal tersebut. Kelompok PKK terdiri dari 8 anggota sudah termasuk pengurus kelompok. Jumlah dana yang di pinjam adalah sebesar Rp. 60.000.000 namun dana yang di kembalikan hanya Rp. 30.300.000 dan tunggakan dana adalah sebesar Rp. 37.500.000 dapat di katakan jumlah tunggakan dan pengembalian lebih besar tunggakan, ini berarti pada kelompok PKK ini hanya setengah anggota saja yang menyetor tiap bulannya.

Menurut salah seorang anggota Ibu EP : *“sejauh ini yang saya lihat pengurus tidak terlalu tegas dalam mengatasi tunggakan dana tersebut. Dan yang saya ketahui ada juga pengurus yang menyalahgunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadinya”.*

Melihat dari tunggakan dana yang ada pada masing-masing kelompok di atas dapat di artikan bahwa selama pelaksanaannya program SPP ini hanya bisa memberikan modal namun masyarakat tidak mampu untuk mengembalikan.

Adapun hambatan-hambatan dalam dana tersebut adalah masyarakat yang hanya sebagai petani yang tidak mampu membayar tiap bulannya dan dana yang di gunakan sebagai modal usaha namun karena banyaknya persaingan sehingga membuat usaha

tersebut harus gulung tikar. Dan ada juga yang menyalahgunakan dana tersebut seperti masyarakat lain sudah menyetor namun masih ada saja tunggakan. Ini di karenakan adanya pengurus yang menyalahgunakan dana yang sudah di setor. Dana yang sudah di setor di salah gunakan oleh pengurus untuk kepentingan pribadinya, hal ini membuat dana yang seharusnya di gulirkan kembali menjadi tidak dapat di cairkan karena tunggakan dana yang cukup besar.

Pemerintah Kecamatan sebagai pengawas dalam program tersebut sudah mengadakan beberapa kali pertemuan dengan Tim Pelaksana Kegiatan, dan pengurus dari masing-masing kelompok namun tetap saja tidak ada perkembangan dalam setiap pertemuannya. Berdasarkan pemaparan di atas mengenai hambatan-hambatan yang terjadi pada pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan di Kecamatan Maesa terlebih khusus pada program SPP yang di jelaskan berdasarkan data bahwa pelaksanaan Program tersebut kurang efektif dan belum sepenuhnya mensejahterakan masyarakat.

Salah satu konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial saat ini adalah melalui pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat menempatkan masyarakat sebagai pelaku dan penerima manfaat dari proses mencari solusi dan meraih hasil pembangunan. Di Kecamatan Maesa terdapat banyak program pengembangan kecamatan. Program pemberdayaan masyarakat yang ada di kecamatan tentunya tersebar di beberapa kelurahan yang ada di kecamatan maesa ini sebahagian besar berasal dari Program pengembangan kecamatan. Program masyarakat dimaksudkan untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat yang ada di kecamatan maesa ini mencakup pembangunan fisik pembuatan lorong /jalan setapak dan beberapa trotoar yang dianggap boleh membantu masyarakat pada umumnya pengguna jalan.

Pembangunan fisik berupa jalan setapak dan trotoar yang dilaksanakan di beberapa kelurahan sudah terlaksana yang ada di kecamatan maesa, tetapi dalam pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya berjalan dengan baik.

Wawancara dengan tokoh masyarakat bapak.....*memang kegiatan pembangunan jalan setapak di kelurahan kadoodaan ini terlaksana, tetapi dalam pandangan saya dengan jumlah dana yang selalu disampaikan pemerintah pada waktu itu, tidak semegah yang saya piirkan.*

Wawancara dengan bapak.....*memang pembangunan trotoar di kelurahan saya terlaksana, tetapi pembangunan trotoar dari beberapa titik diagendakan tidak semuanya terlaksana.*

Program Pengembangan Kecamatan terlaksana dengan kesepakatan dengan pemerintah kecamatan dan pemerintah kelurahan, namun pada pelaksanaan program tersebut mendapatkan banyak permasalahan.

Wawancara dengan tokoh pemuda.....*saya melihat bahwa program pengembangan kecamatan sangat baik tetapi dalam pelaksanaan kegiatan tidak berjalan sesuai keinginan dari masyarakat, Karena kegiatan demi kegiatan tidak berjalan dengan maksimal.*

Berdasarkan temuan-temuan diatas bahwa pembangunan sarana dan prasarana trotoar dan jalan setapak berjalan sesuai dengan agenda dari program pengembangan kecamatan, tetapi dari kegiatan-kegiatan tersebut



mendapatkan kendala yaitu, belum terlaksananya dengan maksimal artinya evaluasi pemerintah harus cepat dalam penanganan program-program pemerintah yang ditujukan pada tingkat kecamatan samapai pada desa atau kelurahan.

### **Kesimpulan**

Penelitian mengenai Evaluasi PNPM Mandiri Pedesaan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Maesa, di mana penelitian ini di kaji dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Evaluasi pelaksanaan program SPP ini di katakan belum berhasil dengan baik. Ada beberapa masalah yang terjadi dalam pelaksanaannya seperti dana yang menunggak di akibatkan oleh beberapa anggota yang tidak menyetor setiap bulan dan adanya pengurus yang menyalahgunakan dana yang sudah di setor. Hal ini membuat pada perguliran berikutnya menjadi terhambat dan membuat tim pengelola menjadi kesulitan dalam mengelola dana tersebut. Hal ini juga di sebabkan oleh kurangnya pemantauan dari tim pemantau kegiatan dan juga Tim Pelaksana kegiatan yang tidak bisa mengkoordinasikan, mengelola dengan baik pelaksanaan kegiatan tersebut. Pelaksanaan program tersebut tidak mencapai tujuan yang sebenarnya yaitu mensejahterakan masyarakat miskin dan memberikan peluang kerja. Dan juga pada program dana bergulir ini bertujuan untuk memberikan peluang kerja. Dan juga pada program dana bergulir ini bertujuan untuk memberikan modal usaha agar masyarakat bisa membangun usaha sendiri. Karena adanya beberapa hambatan dalam pelaksanaannya sehingga program ini tidak berjalan sesuai dengan prosedur yang ada.

Adanya terdapat faktor

penghambat dalam pelaksanaan program tersebut yaitu adanya anggota dan pengurus yang jarang datang dalam pertemuan kelompok dan tidak melaksanakan pengembalian dana setiap bulannya. Beberapa faktor penghambat ini tentu saja mempengaruhi pencapaian tujuan program tersebut. Juga terdapat faktor pendukung dalam pelaksanaan program tersebut yaitu semangat dari pengurus dan anggota yang pro aktif dalam pelaksanaan pengembalian dana setiap bulannya. Faktor pendukung ini mempengaruhi pencapaian tujuan yaitu memberikan kesempatan kaum perempuan meningkatkan ekonomi rumah tangga. Kemudian pada proses pembangunan sarana dan prasarana jalan lorong atau setapak, sudah dilaksanakan sesuai agenda dari program pengembangan kecamatan, namun pada pelaksanaan kegiatan tersebut masih ditemui pembangunan sarana prasarana yang tidak maksimal

### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, peneliti mencoba memberikan saran sebagai berikut:

- a. Perlu adanya pemahaman akan tugas dan fungsi serta rasa memiliki terhadap kegiatan oleh pengurus atau pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program tersebut.
- b. Perlu adanya pemantauan dari tim pemantau kegiatan, agar dalam pelaksanaan program tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan.
- c. Terhadap berbagai faktor pendukung harus di manfaatkan secara baik oleh para pelaku dalam kegiatan sehingga kualitas pemberdayaan terhadap kelompok penerima dana SPP benar-benar optimal.

- d. Terhadap faktor penghambat perlu di benahi dengan cara memaksimalkan pelaksanaan untuk menghindari terjadinya konflik di dalam kelompok serta memberikan pemahaman yang baik kepada seluruh anggota.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharmini, 2002. *Manajemen Penelitian*. Jakarta, Rineka Cipta
- Danim, Sudarwan. 2004. *Motivasi Kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok*. Bengkulu. PT Rineka Cipta.
- Dolbear, Kenneth M. (ed). 1975. *Public Policy Evaluation*. California : Sage Publication, Inc.
- Dunn, N. William, 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gajah Mada : University Press.
- Dye, T.R. 1981. *Policy Analysis*. New Jersey : The University of Alabama Press.
- Friedman, John. 1993. *Empowerment : The Politics of Alternative Development Massachusetts*. MIT Press.
- Gedeian, Arthur, G. 1991. *Organization Theory and Design*. University of Colorado at Denver.
- Hogwood, B. W. & Lewis A. Gunn. 1986. *Policy Analysis For The Real World*. New York : Oxford University Press.
- Islamy, M. Irfan. 2003. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Kismartini, dkk. 2006. *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta. Penerbit Universitas Terbuka.
- Korten, David. C & Sjahrir. 1996. *Pembangunan Berdemensi Kerakyatan*. Jakarta. Yayasan Obor.
- Mahmudi, 2005. *Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : UPP AMP YKPN.
- Milles, Nathew B & A. Michael Huberman. 1992. *Qualitative Data Analisis*. California: Sage Publication Inc.
- Mustopadjaja. 2005. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta. PT. Gunung Agung.
- Moleong, Lexy J. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. Pt. Rosdakarya.
- Nazir, Moh, 1989. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Nugroho, Riant. 2008. *Public Policy*. Jakarta: Elexmedia Komputindo.
- Prijono, Onny S. & Pranaka, A.M.W (ed)1996. *Pembangunan Konsep, Kebijakan & Implementasi*. Jakarta : Centere For Strategic and International Studies (CSIS).
- Rossi, H. Peter, et.al. 1993. *Evaluation : A Sysitematic Approach*. London. Sage Publication
- Sumodiningrat, Gunawan. 2007. *Pemberdayaan Sosial, Kajian Ringkas tentang Pembangunan Manuasia Indonesia*. Jakarta. Kompas.
- Sumaryadi, I. Nyoman. 2005. *Pembangunan Daerah Otonom & Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta : Cita Utama.
- Suharto, Edi. 2006. *Membangun Masyarakat, Memberdayakan Masyarakat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial*. Bandung. Rafika Aditama.
- Subarsono, Ag. 2005. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori & Aplikasi*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Soetomo. 2006. *Startegi-strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Susanto, Azhar. 2004. *Sistem Informasi Manajemen: Konsep dan Pengembangan*. Jakarta : Kencana.
- Steers. 1985. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga